

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tegendentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, agar Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renstra dan Rancangan Renja Perangkat. Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Situbondo, Kecamatan Mlandingan mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Mlandingan, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Mlandingan dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun 2021 -2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi



perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renstra Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun 2021 -2026 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Mlandingan. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun 2021 -2026 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (rencana kerja) Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo selama satu tahun anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun 2021 -2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Renstra Tahun 2021 -2026 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2021 -2026 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021 -2026 berupa cascading dari Visi dan Misi Bupati terpilih dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun 2021 -2026;
2. Renstra Tahun 2021 -2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Situbondo;
3. Renstra Tahun 2021 -2026 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ;



4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) ;

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah



9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Surat Edaran Bersama Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor : 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Penharusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011 – 2025 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Di Kabupaten Situbondo;
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Situbondo
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.;
19. Surat Bupati Situbondo Nomor 050/0065/431.301.5/2021 Tanggal 18 Februari 2021 Perihal Penyusunan Rancangan Awal Renstra dan Rancangan Renja PD;
20. Surat Bupati Situbondo Nomor 050/0151/431.301.5/2021 Tanggal 12 Maret 2021 Perihal Permintaan Rancangan Awal Renstra dan Rancangan Renja PD.
21. Surat Bupati Situbondo Nomor 050/9442/431.301.2/2022 Tanggal 25 Mei 2022 Perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra PD;



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Mlandingan adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mlandingan. Adapun Tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Mlandingan ini adalah Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Situbondo khususnya Kecamatan Mlandingan

Selain itu Renstra ini juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus untuk menentukan arah program kegiatan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sampai dengan tahun 2026.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, renstra K/L dan Renstra Provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat daerah

##### **1.4 Sistematika Penulisan.**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen



BAB II	<p><b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b></p> <p>Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat daerah yang telah dilaksanakan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.</p> <p>2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD</p> <p>2.2 Sumber Daya PD</p> <p>2.3 Kinerja pelayanan kecamatan</p> <p>2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan.</p>
BAB III	<p><b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b></p> <p>3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan</p> <p>3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih</p> <p>3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra</p> <p>3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis</p> <p>3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis</p>
BAB IV	<p><b>TUJUAN DAN SASARAN</b></p> <p>4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah</p> <p>4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD</p>
BAB V	<p><b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b></p> <p>Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Lima tahun mendatang.</p>
BAB VI	<p><b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>, berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.</p>
BAB VII	<p><b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b></p> <p>Berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan diucapai Perangkat Daerah.</p>
BAB VIII	<p><b>PENUTUP</b></p>



# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, sosial, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

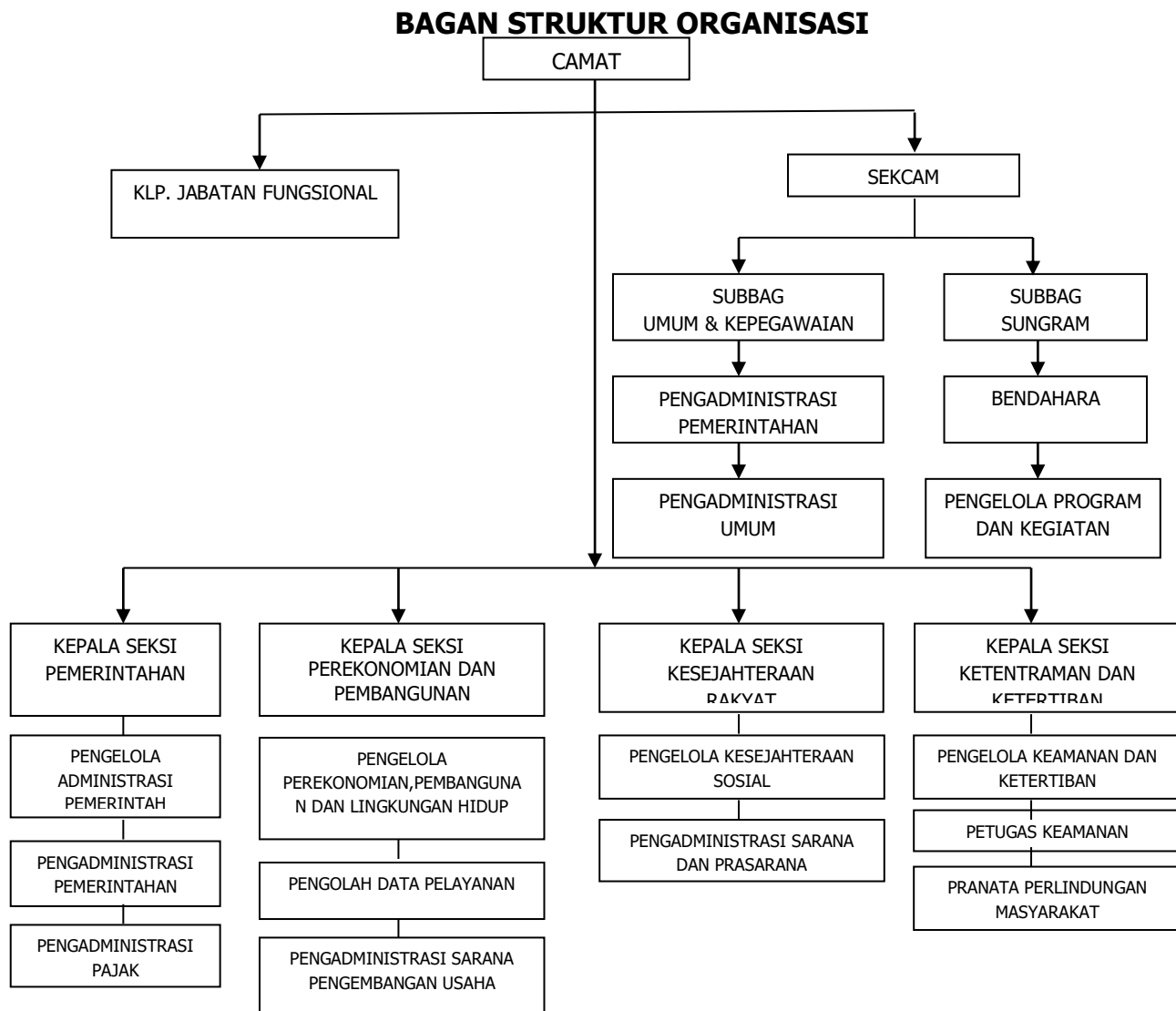
Pemerintah Kecamatan Mlandingan berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan Pemerintah Kabupaten Situbondo segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Situbondo kepada Camat dan Lurah / Kepala Desa agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Situbondo yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan



## 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Gambar 1



Sumber : Peraturan Bupati No 66 Tahun 2008

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo, maka kantor Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan. Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Mlandingan mempunyai Tugas dan fungsi :



## **1. Camat**

Untuk menyelenggarakan tugas, Camat mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

1. Menyenggarakan urusan Pemerintahan Umum
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan
8. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.

## **2. Sekretaris Camat**

Mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana, pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaannya
2. Pengelolaan urusan keuangan
3. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, serta tata usaha perlengkapan
4. Pelaksanaan urusan rumah tangga
5. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkup Kecamatan
6. Pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Camat
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## **3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Melaksanakan tugas dibidang administrasi kepegawaian, administrasi umum, urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan kegiatan rumah tangga serta



melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sub.bagian umum mempunyai fungsi :

1. Pencatatan dan pengarsipan surat menyurat
2. Penyiapan dan pendisposisian surat keluar
3. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler
4. Penyiapan analisa kebutuhan kantor dan pengadministrasiannya
5. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian
6. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
7. Pelaporan hasil Pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan
8. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya

#### **4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan**

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja kecamatan, menghimpun bahan dalam rangka perencanaan dan program pengembangan kegiatan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penghimpunan dan pengolahan bahan – bahan untuk menyusun usulan program kerja
2. Penyiapan rencana kegiatan
3. Penyiapan rencana kebutuhan kantor
4. Penghimpunan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana anggaran
5. Pengelolaan urusan keuangan
6. Pembuatan laporan keuangan
7. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
8. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **6. Seksi Pemerintahan**

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi antar instansi serta forum koordinasi Pimpinan Kecamatan
2. Pembinaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa



3. Pembinaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), Biaya peralihan hak atas tanah/bangunan (BPHTB)
4. Pelaksanaan tugas bidang pertanahan
5. Pelaksanaan tugas pembuatan data monografi kecamatan
6. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## **7. Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

Mempunyai tugas menyiapkan, pembinaan dan pengevaluasian terhadap kegiatan dibidang perekonomian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala seksi perekonomian mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi
2. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat fasilitasi pembangunan desa dan penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat desa
3. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa dan melakukan pendataan industry kecil dan kerajinan
4. Pelaksanaan evaluasi kegiatan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi
5. Penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana perekonomian rakyat
6. Penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan,pelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peras serta masyarakat dalam kebersihan
7. Pembinaan pelayanan umum
8. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan
9. Penyiapan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat
10. Penyiapan bahan pembinaan pelayanan umum serta penyusunan mekanisme pelayanan perijinan
11. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
12. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## **8. Seksi Kesejahteraan Rakyat**



Mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan dan pembinaan terhadap kegiatan di bidang social. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Sosial mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan social
2. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular
3. Penyiapan bahan untuk Penyusunan program pembinaan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga
4. Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan social termasuk bantuan bencana alam
5. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional
6. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## **9. Seksi Keamanan dan Ketertiban**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas camat di bidang penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban serta pelaksanaan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan diwilayah kerja. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Trantib mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data di bidang ketrentaman dan ketertiban
2. Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan ketrentaman dan ketertiban
3. Penyelenggaraan administrasi dan operasional kegiatan administrasi perlindungan masyarakat ( LINMAS )
4. Pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketrentaman dan ketertiban dalam masyarakat
5. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban umum
6. Pembinaan dan pengoordinasian di bidang ketrentaman dan ketertiban
7. Pelaksanaan pembinaan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial
8. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.



## 2.2 Sumber Daya Kecamatan

Kecamatan Mlandingan sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Situbondo. Batas wilayah Kecamatan Mlandingan, disebelah utara berbatasan dengan Selat Madura sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bungatan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Suboh. Luas Kecamatan Mlandingan adalah 39,60 Km<sup>2</sup>. Terdiri dari 7 desa yaitu Selomukti, Sumber Pinang, Alas bayur, Sumberanyar, Campoan, Trebungan dan Mlandingan kulon . Terdiri dari 34 Dusun 52 RW dan 127 RT. Desa terluas adalah Desa Selomukti yaitu 9,83 Km<sup>2</sup> sedangkan luas desa terkecil adalah Desa Trebungan yaitu 2,58 Km<sup>2</sup>. Banyaknya curah hujan pada tahun 2017 adalah 927 mm dengan bulan hujan sebanyak 8 bulan, hari hujan 82 hari dan rata-rata curah hujan per hari 18 mm.

### LUAS DAN JARAK DESA SE- KECAMATAN MLANDINGAN

NO	DESA	LUAS PER KELURAHAN KM <sup>2</sup>	JARAK KE KEC KM
1.	CAMPOAN	8,98	10
2.	TREBUNGAN	2,58	4
3.	SUMBER PINANG	3,85	2
4.	MLANDINGAN KULON	2,85	1
5.	SUMBERANYAR	3,87	5
6.	ALAS BAYUR	7,64	15
7.	SELOMUKTI	9,83	3
<b>JUMLAH</b>		<b>39,60</b>	<b>X</b>

Sumber : Kecamatan Mlandingan Dalam Angka 2019

### Sumber Daya Manusia

Penduduk merupakan obyek pembangunan sekaligus juga subyek pembangunan. Oleh karena itu data kependudukan sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Mlandingan adalah sebanyak 22.376 jiwa yang terdiri dari :

1. Penduduk laki – laki : 10.899 Jiwa
2. Penduduk perempuan : 12.092 Jiwa



3. Sex Ratio : 94.02
4. Kepadatan : 565.05 Jiwa/Km<sup>2</sup>

Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Mlandingan di sektor pertanian dan peternakan.

### Sarana Prasarana Kecamatan

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

#### Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Mlandingan

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga	Ket.
1	Tanah	1	57.967.000	Baik
2	Bangunan Gedung	8	1.448.704.113	Baik
3	Alat Angkutan	14	426.507.000	Baik
4	Alat Besar	6	5.490.000	Baik
5	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2	3.950.000	Baik
6	Alat Pertanian	2	3.000.000	Baik
7	Alat Kantor dan Rumah Tangga	189	459.245.025	Baik
8	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	16	45.558.360	Baik
9	Alat Laboratorium	6	3.000.000	Baik
10	Komputer	40	244.977.905	Baik
11	Tugu Titik Kontrol	1	39.934.000	Baik
12	Jalan, Jaringan dan Irigasi	13	92.963.000	Baik
13	Instalasi	11	76.413.000	Baik
14	Jaringan	2	16.550.000	Baik
<b>JUMLAH</b>			<b>2.791.362.403</b>	

Sumber : Data Simbada Desember 2020

### Sarana dan Prasarana Pendidikan

Prioritas pertama pembangunan di Kabupaten Situbondo adalah Pendidikan, maka dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo adalah pemerataan layanan pendidikan. Adapun Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Mlandingan dapat kita lihat pada tabel berikut ini.



**SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN  
KECAMATAN MLANDINGAN**

NO.	URAIAN	JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH GURU	JUMLAH SISWA
1.	TK	10	29	300
2.	SD	21	351	1585
4.	MI	9	82	322
5.	SLTP	4	38	440
6.	MTs	9	9	347
7.	SLTA	3	18	185
8.	MA	3	71	245

*Sumber : Kecamatan Mlandingan Dalam Angka 2022*

**Sarana dan Prasarana Kesehatan**

Kesehatan adalah prioritas kedua dalam pembangunan di Kabupaten Situbondo. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, pemerintah harus memperhatikan layanan kesehatan di samping pendidikan. Maka dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo juga memperhatikan pemerataan layanan kesehatan. Pada tabel berikut ini adalah data fasilitas/sarana kesehatan di Kecamatan Mlandingan.

**DATA FASILITAS/SARANA KESEHATAN  
KECAMATAN MLANDINGAN**

NO.	SARANA KESEHATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PUSKESMAS	1	
2.	PUSKESMAS PEMBANTU	3	
3.	POLINDES	4	
4.	POSYANDU	33	

*Sumber : Kecamatan Mlandingan Dalam Angka 2022*

**Sosial Budaya**

Keragaman sosial budaya di Indonesia juga mewarnai keberadaan suku dan budaya masyarakat di Kecamatan Mlandingan. Diantaranya adanya suku Jawa dan Suku Madura. Namun yang mendominasi adalah suku Madura yang tersebar di 7 Desa.



Dalam kehidupan beragama, masyarakat Kecamatan Mlandingan hampir 99 % beragama Islam. Hanya ada beberapa sebagian orang yang beragama Hindu .

### Susunan Kepegawaian Kecamatan Mlandingan

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Mlandingan didukung oleh 15 (lima belas) orang pegawai sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.

### Keberadaan Pegawai Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo mengacu pada Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Situbondo

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		L	P	Jumlah
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretariat			
2.1	Sekretaris Camat	1	-	1
2.1.1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-	1
2.1.1.1	Staf Pendukung PNS	-	1	1
2.1.2	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	1	-	1
2.1.2.1	Staf Pendukung PNS	2	-	2
3.	Seksi-seksi			
3.1	Kasi Pemerintahan	1	-	1
3.1.1	Staf Pendukung PNS	1	-	1
3.2	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	1	-	1
3.2.1	Staf Pendukung PNS	1	-	1
3.3	Kasi Kesejahteraan Rakyat	1	-	1
3.3.1	Staf Pendukung PNS	1	-	1
3.4	Kasi ketentraman dan Ketertiban	1	-	1
3.4.1	Staf Pendukung PNS	1	-	1

(sumber : sub bagian umum dan kepegawaian kecamatan Mlandingan)

### Susunan Kepegawaian Kecamatan Mlandingan Berdasarkan Struktural

Tingkat Jabatan	Jumlah
Eselon III A	1 orang
Eselon III B	1 orang
Eselon IV A	4 orang
Eselon IV B	2 orang





Staff *)	7 orang
<b>Jumlah</b>	<b>15 orang</b>

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Mlandingan 2019

### Susunan Kepegawaian Kecamatan Mlandingan Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan Ruang	Jumlah
IV	1 orang
III	9 orang
II	5 orang
<b>Jumlah</b>	<b>15 orang</b>

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Mlandingan Desember 2019

### Susunan Kepegawaian Kecamatan Mlandingan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	- orang
S1	5 orang
Diploma III	1 orang
SMU	9 orang
<b>Jumlah</b>	<b>15 orang</b>

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Mlandingan 2019



**Susunan Kepegawaian Kecamatan Mlandingan  
Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan**

<b>Pendidikan Penjenjangan</b>	<b>Jumlah</b>
Diklat Pim III	- orang
Diklat Pim IV	3 orang
<b>Jumlah</b>	<b>3 orang</b>



## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mlandingan**  
**Kabupaten Situbondo**

NO	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	IKM Kecamatan Mlandingan		Pelayanan Kecamatan		-	B ( 78,29 )	B ( 79,35 )	B ( 82 )	B ( 83,56 )	B ( 84,60 )		B (76,64)	B ( 79,35 )	B ( 82 )	B 83,56	B (84,60)		B 100% (76,64)	B 100% ( 79,35 )	B 100% ( 82 )	B 100% 83,56	B 100% (84,60)
2	Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik		Laporan ADD, DD dan BHP 7 Desa dari 7 Desa		-	90%	90%	100%	100%	100%		90%	90%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100%		Prosentase Penerimaan PBB Sesuai Pagu/Pajak Terhutang		-	70%	-	-	-	-		50%	-	-	-	-		71%	-	-	-	-
4	Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD		Prosentase usulan yang masuk dalam RKPD		-	100% 15 Usulan	100% 15 usulan	-	-	-		100% 15 Usulan	100% 15 usulan	-	-	-		100%	100%	-	-	-

NO	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indika tor Lainny a	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
5	Prosentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti		Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	
6	Meningkatnya pelayanan Paten Kecamatan Mlandingan		Persentase pelayanan Paten yang sesuai SOP		-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%	

Situbondo, 09 Agustus 2023



**ANANG SENA RIYANTO, S.Sos.M.Si**

Pembina Tk. 1

NIP. 196704071988021001



Tabel T-C.24.  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan Kecamatan Mlandingan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Angaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	153.126.000	207.669.000	353.000.000	353.000.000	353.000.000	-	153.126.000	207.669.000	353.000.000	353.000.000	353.000.000	-								
Penyediaan jasa surat menyurat	-	1.350.000	1.980.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	1.350.000	1.980.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	32	32
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-	37.980.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	37.980.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	16	16
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25	25
Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	39.400.000	42.600.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	-	39.400.000	42.600.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8	8
Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	16.000.000	28.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	-	16.000.000	28.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	43	43
Penyediaan alat tulis kantor	-	16.000.000	18.135.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000	-	16.000.000	18.135.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	12
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	2.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	2.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30	30
Penyediaan komponen instalasi listrik/pener	-	4.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	-	4.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	38	38



a																					
bangunan kantor																					
Penyediaan bahan bacaan dan pertauran perundang-undangan	-	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
Penyediaan makanan dan minuman	-	4.496.000	8.994.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	-	4.496.000	8.994.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	50	50
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah	-	10.000.000	19.960.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	-	10.000.000	19.960.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	50	50
Penyediaan jasa keamanan kantor	-	8.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	8.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	68	68
Pengadaan pakaian korpri dan batik tradisional	-	6.300.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	6.300.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	100%	-	100%	100%	100%	-	-
Dukungan pelaksanaan hari besar agama	-	-	-	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-	-	-	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-	-	-	100%	100%	100%	-	-
Dukungan pelaksanaan hari besar nasional	-	-	-	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	-	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	-	100%	100%	100%	-	-
Dukungan penyelenggaraan seribu hadrah	-	-	-	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	-	-	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	-	-	100%	100%	100%	-	-
Dukungan pelaksanaan harjakasi	-	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-	-	100%	100%	100%	-	-
Fasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan	-	-	-	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	-	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	-	100%	100%	100%	-	-
<b>Program peningkatan sarana</b>	<b>-</b>	<b>184.200.000</b>	<b>260.446.000</b>	<b>534.500.000</b>	<b>534.500.000</b>	<b>534.500.000</b>	<b>-</b>	<b>184.200.000</b>	<b>260.446.000</b>	<b>534.500.000</b>	<b>534.500.000</b>	<b>534.500.000</b>	<b>534.500.000</b>	<b>-</b>							



dan prasarana aparatur																					
Pembangunan gedung kantor-	-	64.750.000	-	-	-	-	-	64.750.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	-	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan peralatan gedung kantor	-	17.300.000	72.400.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	17.300.000	72.400.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	76	76	
Pengadaan mebeleur	-	-	14.200.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	14.200.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100	100
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100	100
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	-	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10	10
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	-	82.000.000	89.246.000	98.000.000	98.000.000	98.000.000	-	82.000.000	89.246.000	98.000.000	98.000.000	98.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8	8
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	-	6.100.000	10.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	6.100.000	10.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	39	39
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	-	-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	-	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	-	-	54.600.000	245.000.000	245.000.000	245.000.000	-	-	54.600.000	245.000.000	245.000.000	245.000.000	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100	100



Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	-	9.550.000	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	9.550.000	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	100%	-	100%	100%	100%	-	-
Pemeliharaan rutin/ berkala taman kantor	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	-	100%	100%	100%	-	-
Tambah daya/ pasang baru listrik	-	-	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	100%	100%	100%	100%	100	100
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	-	<b>6.300.000</b>	<b>5.950.000</b>	-	-	-	-	<b>6.300.000</b>	<b>5.950.000</b>	-	-	-	-							
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - pakaian dinas harian (pdh) - pakaian batik	-	3.600.000	3.400.000	-	-	-	-	3.600.000	3.400.000	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	(6)	(6)
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - kemeja putih	-	2.700.000	2.550.000	-	-	-	-	2.700.000	2.550.000	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	(6)	(6)
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	-	<b>14.500.000</b>	<b>23.235.000</b>	<b>41.000.000</b>	<b>41.000.000</b>	<b>41.000.000</b>	-	<b>14.500.000</b>	<b>23.235.000</b>	<b>41.000.000</b>	<b>41.000.000</b>	<b>41.000.000</b>	-							
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	-	2.000.000	2.990.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	2.000.000	2.990.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	33	33
Penyusunan pelaporan keuangan	-	2.000.000	3.441.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	2.000.000	3.441.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	42	42





akhir tahun																					
Penyusunan rka & dpa	-	4.000.000	7.996.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	4.000.000	7.996.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	50	50
Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd)	-	1.500.000	2.986.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	1.500.000	2.986.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	50	50
Penyusunan laporan indeks kepuasan masyarakat (ikm)	-	5.000.000	5.822.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.822.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	14	14
Penyusunan dan evaluasi SOP	-	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	100%	100%	100%	-	-
Penyusunan laporan inventarisasi barang skpd	-	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	100%	100%	100%	-	-
Penyusunan renja skpd	-	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	100%	100%	100%	-	-
Penyusunan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan skpd	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	-	-	100%	100%	100%	-	-
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	-	-	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	-	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	-	-	100%	100%	100%	-	-
Sarana dan informasi promosi	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	-	100%	100%	100%	-	-
<b>Program penyusunan perencanaan pembangunan daerah</b>	-	<b>2.000.000</b>	<b>7.883.000</b>	-	-	-	-	<b>2.000.000</b>	<b>7.883.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan renstra skpd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan renja skpd	-	2.000.000	2.977.000	-	-	-	-	2.000.000	2.977.000	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	33	33



Penyusunan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan skpd	-	-	4.906.000	-	-	-	-	-	4.906.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	100	100
<b>Program penyediaan dukungan data/informasi</b>	-	<b>2.000.000</b>	<b>3.996.000</b>	-	-	-	-	<b>2.000.000</b>	<b>3.996.000</b>	-	-	-	-							
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	-	2.000.000	3.996.000	-	-	-	-	2.000.000	3.996.000	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	50	50
<b>Program pelaksanaan harjakasi</b>	-	<b>10.000.000</b>	<b>21.640.000</b>	-	-	-	-	<b>10.000.000</b>	<b>21.640.000</b>	-	-	-	-							
Dukungan pelaksanaan harjakasi	-	10.000.000	21.640.000	-	-	-	-	10.000.000	21.640.000	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	54	54
<b>Program pelaksanaan phba dan phbn</b>	-	<b>35.000.000</b>	<b>63.820.000</b>	-	-	-	-	<b>35.000.000</b>	<b>63.820.000</b>	-	-	-	-							
Dukungan pelaksanaan hari besar agama	-	15.000.000	17.550.000	-	-	-	-	15.000.000	17.550.000	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	15	15
Dukungan pelaksanaan hari besar nasional	-	15.000.000	38.950.000	-	-	-	-	15.000.000	38.950.000	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	61	61
Dukungan penyelenggaraan seribu hadrah	-	5.000.000	7.320.000	-	-	-	-	5.000.000	7.320.000	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	32	32
<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>	-	<b>37.000.000</b>	<b>58.836.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	-	<b>37.000.000</b>	<b>58.836.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	-						
Penunjang program add	-	28.000.000	28.958.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	28.000.000	28.958.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	3	3
Verifikasi dan pendampingan pengelolaan	-	9.000.000	29.878.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	9.000.000	29.878.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	70	70



keuangan desa																				
<b>Program penataan daerah otonomi baru</b>	-	<b>108.750.000</b>	<b>132.100.000</b>	<b>133.000.000</b>	<b>133.000.000</b>	<b>133.000.000</b>	-	<b>108.750.000</b>	<b>132.100.000</b>	<b>133.000.000</b>	<b>133.000.000</b>	<b>133.000.000</b>	-							
Lomba kecamatan berprestasi/sinergitas kecamatan	-	98.750.000	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	98.750.000	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	100%	-	100%	100%	100%	-	-
Pendampingan kota sehat	-	10.000.000	16.320.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	10.000.000	16.320.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	39	39
Dukungan peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kecamatan	-		98.900.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-		98.900.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-	100%	100%	100%	100%	100	100
Fasilitasi tkpk tingkat kecamatan	-		16.880.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-		16.880.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	100%	100%	100%	100%	100	100
Pelaksanaan program raskin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan</b>	-	<b>74.202.000</b>	<b>87.375.000</b>	<b>109.000.000</b>	<b>109.000.000</b>	<b>109.000.000</b>	-	<b>74.202.000</b>	<b>87.375.000</b>	<b>109.000.000</b>	<b>109.000.000</b>	<b>109.000.000</b>	-							
Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	-	9.527.000	10.590.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	9.527.000	10.590.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	10	10
Pembinaan administrasi pemerintahan umum dan bpd	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	-	100%	100%	100%	-	-
Penyelenggaraan lomba desa	-	5.992.000	6.890.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	-	5.992.000	6.890.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	13	13
Pembinaan kamtibmas dan linmas	-	12.000.000	22.400.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	-	12.000.000	22.400.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	46	46



Pembinaan dan monitoring administrasi pbb	-	9.968.000	11.560.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	9.968.000	11.560.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	14	14
Pembinaan pengembangan perekonomian desa-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
Penyelenggaraan - bulan bakti - gotong royong	-	7.500.000	8.090.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	7.500.000	8.090.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7	7
Pelaksanaan musrenbang kecamatan	-	9.215.000	11.045.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	-	9.215.000	11.045.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	17	17
Fasilitasi pelaksanaan raskin	-	20.000.000	16.800.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	16.800.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(19)	(19)
<b>Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan</b>	-	<b>26.932.000</b>	<b>27.890.000</b>	<b>37.000.000</b>	<b>37.000.000</b>	<b>37.000.000</b>	-	<b>26.932.000</b>	<b>27.890.000</b>	<b>37.000.000</b>	<b>37.000.000</b>	<b>37.000.000</b>	-								
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - pembinaan organisasi perempuan	-	11.998.000	13.700.000	-	-	-	-	11.998.000	13.700.000	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	12	12
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - pembinaan organisasi masyarakat	-	9.968.000	14.190.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	9.968.000	14.190.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30	30
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan -	-	4.966.000	-	-	-	-	-	4.966.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-



pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat																					
Peningkatan pemberdayaan pkk	-	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	
Pembinaan karang taruna	-	-	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	-	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-	-	-	-	-	2,080,074,616.00	-	-	-	-	-	1,799,792,282.00	-	-	-	-	-	86,53 %	-	-	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	18,000,000	-	-	-	-	-	17,610,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,517,270,132						1,340,112,525									
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-						-									
Administrasi Umum Perangkat Daerah						70,414,619						69,942,000									
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						27,153,500						27,150,000									
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						218,629,125						128,789,569									
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						21,236,000						21,096,000									



PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	-	83,736,000.00	-	-	-	-	-	83,571,000.00	-	-	-	-	-	99,8-%	-	-	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	21,236,000	-	-	-	-	-	21,096,000-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-	-	-	-	62,500,000	-	-	-	-	-	62,475,000-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	-	42,431,705	-	-	-	-	-	42,376,250.00	-	-	-	-	-	98,87%	-	-	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	-	42,431,705	-	-	-	-	-	42,376,250-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	-	28,954,345.00	-	-	-	-	-	28,888,600.00	-	-	-	-	-	99,77%	-	-	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	28,954,345	-	-	-	-	-	28,888,600-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	1.517.094.000	1.594.011.000	2.162.000.000	2.162.000.000	2.162.000.000	-	1.517.094.000	1.594.011.000	2.162.000.000	2.162.000.000	2.162.000.000	-							32	32



Adanya Renstra pada tahun 2022, yang pada awalnya Kecamatan Mlandingan dibebani sasaran strategis pada anggaran tahun 2019 yaitu 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator. Dari ketiga indikator tersebut, indikator IKM sudah memenuhi target, Persentase Desa dengan pelaporan Keuangan tertib dan baik yang masuk pada RKPD belum tercapai serta persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti sudah memenuhi target, hal ini dikarenakan :

- Adanya perubahan interval IKM di tahun 2021
- Masih rendahnya SDM ditingkat perangkat Desa
- Lemahnya akuntabilitas pemerintah Desa dalam mengelola ADD

Capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang terdiri dari 2 indikator kinerja untuk mendukung 2 sasaran strategis, capaian kinerja selama tahun 2021 terdapat 1 indikator kinerja yang mencapai target yaitu Meningkatnya pelayanan Paten Kecamatan Mlandingan, Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik belum mencapai target, dan Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.**

### **2.4.1 Tantangan.**

Selain peluang diuraikan diatas terdapat pula tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Mlandingan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar system organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Mlandingan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan

### **2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.**

Secara keseluruhan peluang yang dimiliki oleh Kecamatan Mlandingan adalah situasi kecamatan yang kondusif, koordinasi yang cukup baik antara kecamatan dengan Kepala Desa dan muspika, sehingga kesemuanya dapat mendukung program kegiatan yang akan dilaksanakan.





# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Pada tahun 2021 yaitu merupakan awal pelaksanaan dari pelaksanaan Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Mlandingan Tahun 2021-2026, pelayanan Kecamatan Mlandingan pada umumnya dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Agar tingkat pelayanan tersebut dapat terukur, maka disusunlah target kinerja pelayanan Perangkat Daerah, ditetapkan melalui indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diukur melalui capaian hasil survei IKM. Pengukuran IKM di Kecamatan Mlandingan dimulai Tahun 2018 dengan hasil penilaian sebesar 77,70 hasil survei ini sangat penting dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Mlandingan antara lain:

- Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai
- Sistem kerja yang belum optimal
- Sumber daya manusia yang belum optimal
- Kapasitas kelembagaan desa belum optimal
- Infrastruktur pedesaan masih kurang

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Situbondo, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Mlandingan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Situbondo. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

**“Situbondo Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya**

**( Situbondo Berjaya ) ”**

#### ❖ BERAKHLAK

1. Mengedepankan kepentingan Bersama/kemaslahatan Bersama.
2. Berakhlak berdasarkan garis norma kehidupan bernegara dan beragama.
3. Berakhlak dalam peningkatan SDM yang berkualitas dan Unggul yang.



4. Berakhlak dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan alam.

❖ **SEJAHTERA**

1. Jumlah dan pemerataan pendapatan dan hal ini terkait pembangunan ekonomi;
2. Akses Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau;
3. Kualitas Kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

❖ **ADIL**

1. Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
2. Keberpihakan Pemerintah Terhadap Akses Ekonomi Masyarakat

❖ **BERDAYA**

1. Masyarakat yang mampu memanfaatkan semua potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan di sekitarnya.
2. Menjadikan skill, kemampuan, keterampilan, kreatifitas sebagai modal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
3. Memahami situasi perubahan yang ada di sekitarnya baik yang berasal dari dalam maupun dari luar untuk pengembangan diri.
4. Pengembangan kapasitas SDM unggul, ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan desa dalam Kawasan untuk menciptakan produk unggulan.
5. Tercapainya Aparatur yang profesional, kreatif inovatif efektif efisien dan bebas korupsi sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, integritas dan melayani



**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

**Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SITUBONDO YANG BERAKHLAK, SEJAHTERA, ADIL DAN BERJAYA**

No	Misi dan program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<b>MISI 4 : MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, BERSIH DAN TANGGUH</b>				
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Belum terkonsentrasi perencanaan dan penggaran alokasi Dana Desa untuk peningkatan Indek Desa Membangun (IDM)	Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten	Letak strategis Kecamatan Mlandingan berada di wilayah barat kab Situbondo
	Meningkatnya inovasi layanan berbasis digital.	Belum tersedianya Layanan berbasis digital	Belum maksimalnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa berbasis Inklusi Pelayanan Kecamatan kurang efektif dan efisien disebabkan belum tersedianya pelayanan berbasis teknologi menuju WBK/WBBM Kurangunya jumlah sarana dan prasana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat	Letak strategis Kecamatan Mlandingan berada di wilayah barat kab Situbondo dan Masyarakat yang sudah memiliki pemahaman modern

Sedangkan untuk Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yaitu Visi adalah "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak". Berdasarkan visi tersebut dapat diterjemahkan bahwa seluruh elemen dan *stakeholders* yang ada di Jawa Timur saling bekerjasama dengan mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Jawa Timur yang lebih sejahtera. Untuk mewujudkan Visi pembangunan Jawa Timur 2015-2019 ditempuh melalui lima Misi yang diberi *branding* "Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik". *Branding* ini mempunyai arti sebagai kesinambungan sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari misi sebelumnya (2009-2014) yaitu "Makmur Bersama Wong Cilik Melalui APBD untuk Rakyat". *Branding* tersebut mbingkai lima misi untuk mewujudkan visi Jawa Timur 2014-2019, yang menunjukkan keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada elemen masyarakat yang lemah sekaligus menegaskan bahwa upaya mewujudkan visi



“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak” tersebut adalah bersifat inklusif dan berkeadilan, terutama bagi wong cilik atau kelompok masyarakat *grassroot* yang kebanyakan kurang beruntung secara sosial ekonomi. Usaha-usaha untuk mewujudkan visi Kabupaten Situbondo 2016-2021 dijabarkan dalam **misi pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026 sebagai berikut:**

1. Membangun Masyarakat Situbondo yang Beriman dalam Keberagaman;
2. Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas dan meningkatkan peran Perempuan;
3. Membangun Infrastruktur, ekonomi berkeadilan dan berdaya saing;
4. Membangun Pemerintahan yang professional, bersih dan tangguh.

Indikator pencapaian ke empat misi berdasarkan visi tersebut adalah pembangunan Kabupaten Situbondo tersebut dapat dinilai dari misi Kecamatan sebagai prioritas lokasi dalam Arah Kebijakan, Agenda Dan Prioritas Pada Tahun 2021-2026 RPJPD Kabupaten Situbondo mengemban misi Bupati terpilih sesuai dengan misi yang keempat yaitu Membangun Pemerintahan yang professional, bersih dan tangguh. Misi ini bertujuan diarahkan untuk mewujudkan Kemudahan Pelayanan Mall Pelayanan Publik dan pematapan tatakelola pemerintahan yang baik (good government).

Adapun agenda yang harus dilaksanakan di tingkat kecamatan antara lain: Pengawasan Aparatur, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengembangan kerjasama antar daerah dan lembaga, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, penyelenggaraan administrasi yang tertib dan baik, evaluasi dan pengawasan kelembagaan daerah dan pengembangan kelembagaan kerjasama antar daerah dan diklat aparatur daerah.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Mlandingan.**

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi , fleksibilitas, distribusi barang dan jasa yang ketatanegaraan , arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai



sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoism yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu : **Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur.** Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Kabupaten Situbondo pada tahap kedua RPJP Daerah dan RPJM Daerah tahun 2021 – 2026 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian isu yang bersifat local dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Situbondo, antara lain :

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Situbondo yaitu :

1. Meningkatkan Sarana-prasaran tempat ibadah, Pesantren dan kesejahteraan guru ngaji
2. Penanganan PMKS, peningkatan bantuan sosial dan menjadikan kabupaten layak anak, difable dan lansia
3. Pemerataan akses dan pemenuhan standar layanan dan tenaga Pendidikan Umum dan Diniyah
4. Memperluas layanan Kesehatan dan kualitas fasilitas Kesehatan (Situbondo Sehat Gratis=SEHATI)
5. Ketahanan ekonomi keluarga dan Pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak



6. Pengembangan produk unggulan, Ekonomi Kreatif dengan Situbondo 'NyaraInvestasi' untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan PAD
7. Afirmasi kepada petani dan nelayan dengan pembinaan, fasilitasi, pendampingan dan asuransi
8. Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur ekonomi, pertanian dan pariwisata
9. Infrastruktur dasar rumah layak huni, sanitasi layak dan ketersediaan air bersih
10. Sarana dan prasarana daya dukung lingkungan
11. Transformasi birokrasi dan manajemen pemerintahan berbasis Digital
12. Meningkatkan inovasi layanan publik terintegrasi dengan data kependudukan

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penataan ruang Kabupaten Situbondo yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatnya daya tampung. Oleh karenanya pengolahan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi system tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Situbondo yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kabupaten Situbondo serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Situbondo. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Situbondo. Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industry pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang.

Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten Situbondo tahun 2021 -2026 ditetapkan prioritas penataan rancangan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Penguatan Keberdayaan Kelompok Tani dan Nelayan serta Kelompok Masyarakat;.



2. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Pendukung Produksi Pertanian, Perikanan, & Peternakan.
3. Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata.
4. Infrastruktur Dasar: Jalan antar Desa, RTLH, Air Bersih dan Sanitasi Layak, Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan.
5. Pemenuhan Infrastruktur Jaringan Internet Seluruh Desa.
6. Penguatan Sistem Perijinan dan Investasi.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.**

- Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.



# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi guna mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas bagi arah semua program dan aktivitas Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun tujuan yang diharapkan Kecamatan Mlandingan dalam jangka waktu satu tahun ke depan adalah : “• **Meningkatkan kualitas layanan Publik**”.

Sedangkan Sasaran strategis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dapat dirumuskan sebagai berikut :

#### **Sasaran Strategis :**

1. Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Mlandingan
2. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Mlandingan.





**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mlandingan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KET
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	
1	Meningkatkan kualitas layanan masyarakat dan meningkatkannya desa maju di kecamatan Mlandingan		Nilai survey IKM kec. Mlandingan	B (84,60)	A (85,50)	B(87)	A(90)	A (91,60)	A(95)	IKU
			Jumlah desa berkembang menjadi desa maju di kecamatan Mlandingan	1	1					
			Meningkatnya pelayanan Paten Kecamatan Mlandingan	100%	100%					
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100%	100%					
1	Meningkatkan kualitas layanan Publik di kecamatan Mlandingan	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Mlandingan	Rata-rata lama Pelayanan Paten Kecamatan			10 Menit	10 Menit	10 Menit	10 Menit	
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa Di Kecamatan Mlandingan	Persentase Desa di Kecamatan Mlandingan yang meningkat IDM nya			100%	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Perangkat Daerah	Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	A (85) Memuaskan	A (85) Memuaskan	A (90) Memuaskan	A (90) Memuaskan	A (90) Memuaskan	A (90) Memuaskan	NON IKU



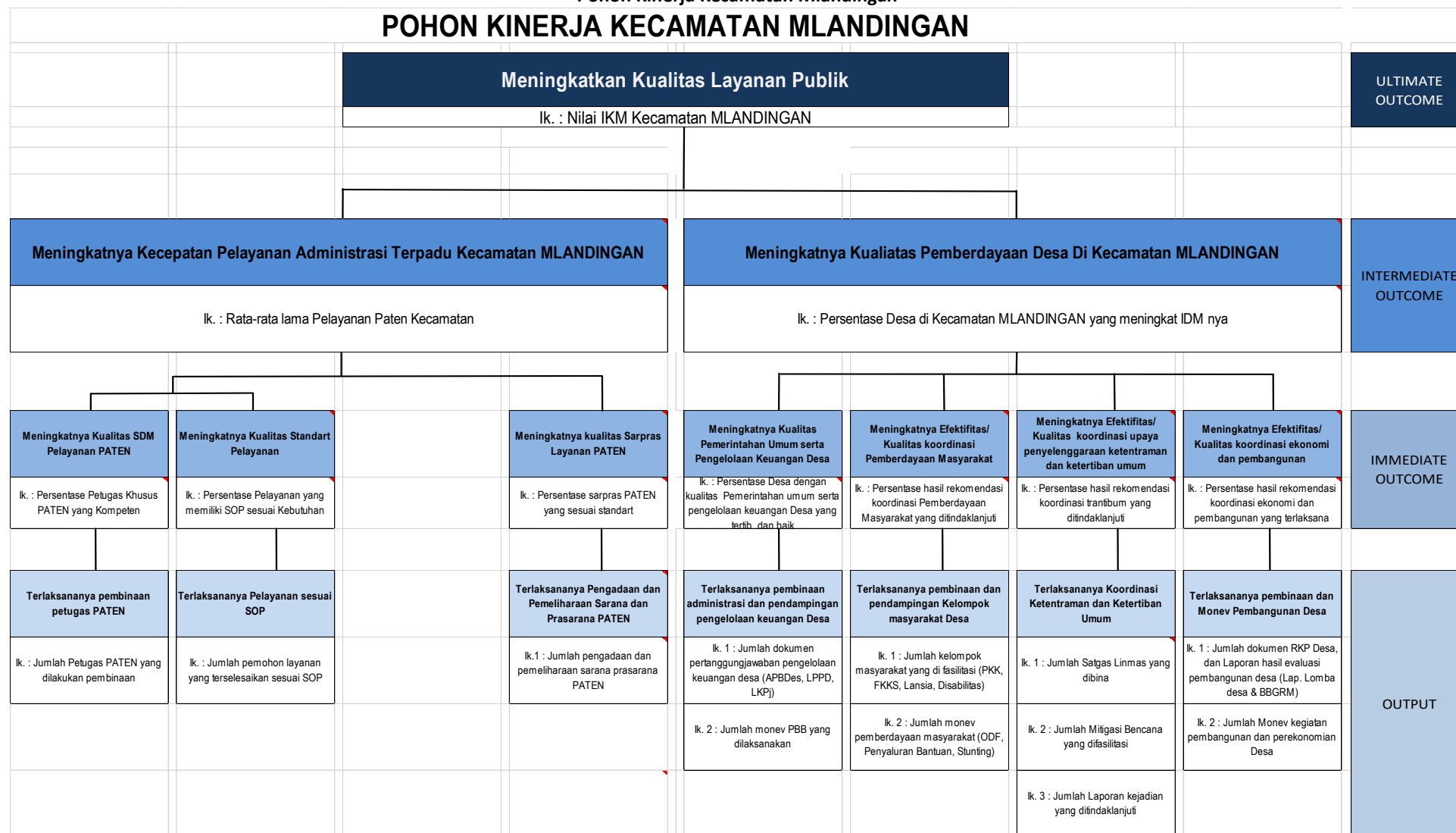
Tabel 4.2

## Formulasi Perhitungan Indikator Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA
	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
1	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Mlandingan	Rata-rata lama Pelayanan Paten Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah Pemohon Pelayanan PATEN di Kecamatan}}{\text{Jumlah Waktu Pelayanan}}$	Sekretariat dan Seluruh Kasi	Data PATEN
2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa Di Kecamatan Mlandingan	Persentase Desa di Kecamatan Mlandingan yang meningkat IDMya	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah desa di Kecamatan Mlandingan}} \times 100 \%$	Seluruh Kasi	IDM, DD, ADD



Tabel 4.3  
Pohon Kinerja Kecamatan Mlandingan



Tabel 4.4  
Penjabaran Pohon Kinerja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Outcome	Ouput	Indikator Output
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan Besuki	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Besuki	Rata - Rata Lama Pelayanan PATEN	Meningkatnya Kualitas SDM Pelayanan PATEN	Persentase petugas khusus PATEN yang kompeten	Terlaksananya pembinaan petugas PATEN	Jumlah Petugas PATEN yang dilakukan pembinaan
					Meningkatnya Kualitas Standar Pelayanan	Persentase pelayanan yang memiliki SOP sesuai kebutuhan	Terlaksananya Pelayanan sesuai SOP	Jumlah Pemohon Layanan yang Terselesaikan sesuai SOP
					Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan PATEN	Persentase sarana dan prasarana PATEN yang Sesuai Standar	Tersedianya dan Terpeliharanya sarana dan prasarana PATEN	Ik. 1 : Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana PATEN Ik. 2 : Jumlah Sarana dan Prasarana PATEN yang Terpelihara
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa Di Kecamatan Besuki	Persentase Desa di Kecamatan Besuki yang meningkat IDM nya	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Umum serta Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa dengan Kualitas Pemerintahan Umum serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Balik	Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Ik. 1 : Jumlah dokumen pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa (APBDes, LPPD, LKPj) Ik. 2 : Jumlah monev PBB yang dilaksanakan
					Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Ik. : Persentase Hasil Rekomendasi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Masyarakat Desa	Ik. 1 : Jumlah kelompok masyarakat yang di fasilitasi (PKK, FKKS, Lansia, Disabilitas) Ik. 2 : Jumlah monev pemberdayaan masyarakat (ODF, Penyaluran Bantuan,

							Stunting)	
					Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Hasil Rekomendasi Koordinasi Trantibum yang Ditindaklanjuti	Terlaksananya Pembinaan Linmas dan Mitigasi Bencana	Ik. 1 : Jumlah Satgas Linmas yang dibina Ik. 2 : Jumlah Mitigasi Bencana yang difasilitasi Ik. 3 : Jumlah Laporan kejadian yang ditindaklanjuti
					Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan yang Terlaksana	Terlaksananya pembinaan dan Monev Pembangunan Desa	Ik. 1 : Jumlah dokumen RKP Desa, dan Laporan hasil evaluasi pembangunan desa (Lap. Lomba desa & BBGRM) Ik. 2 : Jumlah Monev kegiatan pembangunan dan perekonomian Desa



# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 MATRIK ANALISA SWOT

#### MATRIK SWOT

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p><b>KEKUATAN (STRENGTH)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda Nomor 68 Tahun 2016 tentang SOTK Kecamatan</li> <li>2. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/684/P/006.2/2014 tentang Kecamatan Pelaksana PATEN</li> <li>3. SDM aparatur Kecamatan Mlandingan sangat memadai dari tingkat pendidikan dan profesional serta mempunyai integritas yang tinggi</li> <li>4. Sistem pelayanan publik yang baik</li> <li>5. Hubungan kerja dan koordinasi yang kondusif dan nyaman</li> <li>6. Hasil survey kepuasan sesuai dengan standarisasi pelayanan publik.</li> </ol>	<p><b>KELEMAHAN (WEAKNESSES)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedia tenaga teknis khusus untuk memberikan pelayanan Paten</li> <li>2. Kurang memadainya sarana dan prasarana gedung pelayanan</li> <li>3. Belum tersedianya aplikasi pelayanan berbasis teknologi</li> </ol>
<p><b>KESEMPATAN (OPPORTUNITIES)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem dan birokrasi tertata dengan baik.</li> <li>2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas</li> <li>3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan Berprakarsa seluas – luasnya bagi Kecamatan</li> <li>4. Hubungan yang</li> </ol>	<p><b>STRATEGI (S-O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan Kecamatan dapat melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) sesuai dengan surat keputusan</li> <li>2. Memberikan Kepastian hukum terhadap produk-produk pelayanan yang disediakan</li> <li>3. Menciptakan layanan kecamatan situbondo "AKTIF" (Amanah, Komitmen, Transparan dan Familier)</li> </ol>	<p><b>STRATEGI (W-O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepimpinan Camat yang visioner dapat memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pelayanan</li> <li>2. Kualitas SDM yang mempunyai integritas dapat berinovasi untuk memajukan pelayanan kepada masyarakat</li> </ol>

<p>harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>)</p> <p>5. Ditetapkannya RPJPM Kabupaten Situbondo merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo</p>	<p>4. Progressing hasil survey kepuasan masyarakat</p>	
<p><b>ANCAMAN (THREATS)</b></p> <p>1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan.</p> <p>2. Adanya perantara / Calo pengurusan administrasi Paten</p> <p>3. Adanya Pungli Petugas PATEN Kecamatan</p>	<p><b>STRATEGI (S-T)</b></p> <p>1. Melaksanakan Zona Integritas (ZI) dengan menerapkan kedisiplinan kepada aparatur Kecamatan Situbondo</p> <p>2. Menyediakan kotak saran serta kuisisioner bagi masyarakat</p>	<p><b>STRATEGI (W-T)</b></p> <p>1. Memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan Paten Kecamatan</p> <p>2. Membuat komitmen dan Maklumat bersama tentang Bebas Pungutan Liar</p>

## STRATEGI DAN KEBIJAKAN

<p>Visi : Mewujudkan Masyarakat Situbondo Yang berakhlak sejahtera adil dan berjaya</p>			
<p>Misi : Membangun pemerintahan yang profesional, bersih dan tangguh</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Meningkatkan kualitas layanan masyarakat dan meningkatnya desa maju di kecamatan Mlandingan</p>	<p>Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan desa</li> <li>• Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa</li> <li>• Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa</li> </ul>	<p>Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan menuju <i>Good Governance</i></p>
	<p>Meningkatnya pelayanan Paten Kecamatan Mlandingan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik</li> <li>• Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan berbasis teknologi</li> </ul>	<p>Pembangunan ZONA INTEGRITAS (ZI) menuju Wilayah Zona Bebas Korupsi (WBK) &amp; Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)</p>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Memberikan fasilitasi pelayanan inklusi</li></ul>	
--	--	---	--





# BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai perencanaan Rencana Kerja tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Situbondo mempergunakan SIPKD atau Sistem Informasi Perencanaan Keuangan Daerah dengan tujuan untuk mempermudah proses penyusunan perencanaan-penganggaran pembangunan daerah, memperkecil kemungkinan kesalahan perencanaan-penganggaran dan mempermudah pemantauan dan evaluasi proses perencanaan-penganggaran mulai dari Kepala Daerah hingga aparatur pemerintah daerah secara keseluruhan. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel T-C.27 sebagaimana terlampir.

Tabel T-C.27

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Mlandingan  
Kabupaten Situbondo**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
								2.442.464.408		2.728.214.760		2.953.617.147		3.165.686.647		3.391.027.014		14.461.758.254		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang profesional	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	2.295.721.398	100%	2.570.390.390	100%	2.783.121.870	100%	2.980.675.678	100%	3.189.355.552	100%	13.600.013.168	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	42.900.000		62.790.000		133.848.000		196.817.400		290.085.120		653.931.809		
			7 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	jumlah dokumen data dan statistik daerah yang disusun	1 dokumen	dokumen	3.900.000	dokumen	10.140.000	dokumen	13.182.000	dokumen	17.136.600	dokumen	22.277.580	6 dokume	66.636.180	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7 01 01 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	5 buku	5 buku	3.900.000	5 buku	5.850.000	5 buku	8.775.000	5 buku	13.162.500	5 buku	19.743.750	5 buku	51.431.250	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7 01 01 2,01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang	5 buku	5 buku	3.900.000	5 buku	5.850.000	5 buku	8.775.000	5 buku	13.162.500	5 buku	19.743.750	5 buku	51.431.250	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7 01 01 2,01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	5 buku	5 buku	3.900.000	5 buku	5.850.000	5 buku	8.775.000	5 buku	13.162.500	5 buku	19.743.750	5 buku	51.431.250	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7 01 01 2,01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang	5 buku	5 buku	3.900.000	5 buku	5.850.000	5 buku	8.775.000	5 buku	13.162.500	5 buku	19.743.750	5 buku	51.431.250	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7 01 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	jumlah dokumen evaluasi SOP yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	3.900.000	2 dokume	29.250.000	2 dokume	43.875.000	2 dokumen	65.812.500	2 dokume	98.718.750	2 dokume	241.556.250	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil Perencanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	1.602.367.301		1.716.981.101		1.732.677.101		1.751.512.301		1.774.114.541		8.577.652.347	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7 01 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang terbayar selama setahun	14 bulan	14 bulan	1.536.967.301	14 bulan	1.638.501.101	14 bulan	1.638.501.101	14 bulan	1.638.501.101	14 bulan	1.638.501.101	14 bulan	8.090.971.707	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7 01 01 2,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah pengelola jasa administrasi keuangan yang	7 ob	7 ob	57.600.000	7 ob	69.120.000	7 ob	82.944.000	7 ob	99.532.800	7 ob	119.439.360	7 ob	428.636.160	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7 01 01 2,02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan inventarisasi barang SKPD	2 laporan	2 laporan	3.900.000	2 laporan	4.680.000	2 laporan	5.616.000	2 laporan	6.739.200	2 laporan	8.087.040	2 laporan	29.022.240	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7 01 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	3.900.000	1 dokume	4.680.000	1 dokume	5.616.000	1 dokumen	6.739.200	1 dokume	8.087.040	1 dokume	29.022.240	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7 01 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	3.567.520		8.250.000		8.250.000		8.250.000		8.250.000		36.567.520	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7 01 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang dibeli		15 stel	3.567.520	15 stel	50 8.250.000	15 stel	8.250.000	15 stel	8.250.000	15 stel	8.250.000	15 stel	36.567.520	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN



			7	01	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>109.795.192</b>		<b>132.084.230</b>		<b>158.501.076</b>		<b>190.201.292</b>		<b>228.241.550</b>		<b>818.823.341</b>	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN		
			7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	4 jenis	4 jenis	6.908.830	4 jenis	8.290.596	4 jenis	9.948.715	4 jenis	11.938.458	4 jenis	14.326.150	4 jenis	51.412.749	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN	
			7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis atk yang dibeli	19 jenis	19 jenis	12.985.400	19 jenis	15.582.480	19 jenis	18.698.976	19 jenis	22.438.771	19 jenis	26.926.525	19 jenis	96.632.153	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN	
			7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	2 jenis	5.999.325	2 jenis	7.199.190	2 jenis	8.639.028	2 jenis	10.366.834	2 jenis	12.440.200	2 jenis	44.644.577	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN	
			7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terdapat	2 jenis	2 jenis	2.880.000	2 jenis	3.456.000	2 jenis	4.147.200	2 jenis	4.976.640	2 jenis	5.971.968	2 jenis	21.431.808	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN	
			7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah ASN yang mengikuti rapat dinas	15 orang	15 orang	60.696.637	5 orang	97.555.964	5 orang	117.067.157	5 orang	140.480.589	5 orang	168.576.706	5 orang	584.377.054	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN	
			7	01	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>22.363.130</b>		<b>105.526.699</b>		<b>107.260.225</b>		<b>126.190.847</b>		<b>107.016.227</b>		<b>468.357.127</b>	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN		
								Pengadaan kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan dinas yang dibeli	0	-	0	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	160.000.000	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN	
			7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang dibeli	3 jenis	5 jenis	3.714.396	5 jenis	4.457.275	5 jenis	5.348.730	5 jenis	6.418.476	5 jenis	6.418.476	5 jenis	26.357.354	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN	
			7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	jumlah jenis sarana informasi dan promosi	2 jenis	-	-	2 jenis	56.986.983	2 jenis	68.384.380	2 jenis	82.061.256	2 jenis	53.790.967	2 jenis	261.223.585	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN	
			7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dibeli	3 unit	4 unit	3.402.034	4 unit	4.082.441	4 unit	4.898.929	4 unit	5.878.715	4 unit	11.255.397	4 unit	29.517.516	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN	
			7	01	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>218.917.875</b>		<b>374.409.663</b>	0	<b>399.650.629</b>	0	<b>425.965.692</b>	0	<b>453.449.761</b>	0	<b>453.449.761</b>	0	<b>1.872.393.619</b>	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menurat	jumlah surat yang terkirim	750 surat	1000 surat	3.000.000	1000 surat	3.300.000	1000 surat	3.630.000	1000 surat	3.993.000	1000 surat	4.392.300	1000 surat	18.315.300	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN	
			7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air	48 rekening	3 rekening	61.788.000	3 rekening	67.966.800	3 rekening	74.763.480	3 rekening	82.239.828	3 rekening	90.463.811	3 rekening	377.221.919	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN	
			7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa keamanan kantor yang terbayar	5 ob	5 ob	60.000.000	5 ob	303.142.863	5 ob	321.257.149	5 ob	339.732.864	5 ob	358.593.650	5 ob	1.382.726.525	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN	
			7	01	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>149.067.370</b>		<b>170.348.697</b>		<b>242.934.839</b>		<b>281.738.147</b>		<b>328.198.353</b>		<b>1.172.287.406</b>	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN		
			7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 unit	16 unit	102.382.270	17 unit	119.000.497	18 unit	130.900.547	19 unit	143.990.601	20 unit	158.389.662	20 unit	654.663.577	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN	
			7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebeleur yang	15 unit	15 unit	3.015.000	15 unit	3.316.500	15 unit	3.648.150	15 unit	4.012.965	15 unit	4.414.262	15 unit	18.406.877	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN	
			7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang dipelihara	2 unit	2 unit	6.497.150	2 unit	41.435.120	2 unit	49.722.144	2 unit	59.666.573	2 unit	71.599.887	2 unit	228.920.874	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN	
			7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	30 unit	30 unit	5.497.150	30 unit	6.596.580	30 unit	7.915.896	30 unit	9.499.075	30 unit	11.398.890	30 unit	40.907.591	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN	



Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang profesional	Meningkatnya Layanan Masyarakat yang berbasis Pakem (Pelayanan aktif, kreatif)	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%	84.965.970	100%	87.840.392	100%	91.077.821	100%	94.729.671	100%	98.855.520	100%	457.469.375	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7	01	02	2,01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	21.187.720		23.306.492		25.637.141		28.200.855		31.020.941		129.353.149	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7	01	02	2,01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang	6 rekomendasi	6 rekomendasi	21.187.720	6 rekomendasi	23.306.492	6 rekomendasi	25.637.141	6 rekomendasi	28.200.855	6 rekomendasi	31.020.941	6 rekomendasi	129.353.149	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7	01	02	2,02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	100%	100%	63.778.250		64.533.900		65.440.680		66.528.816		67.834.579		328.116.225	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7	01	02	2,02	02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Petugas Paten Yang terbayar	5 orang	5 orang	60.000.000	5 orang	64.533.900	5 orang	60.000.000	5 orang	60.000.000	5 orang	60.000.000	5 orang	304.533.900	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%	21.379.700	100%	23.517.670	100%	25.869.437	100%	28.456.381	100%	31.302.019	100%	130.525.206	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7	01	03	2,01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa	100%	100%	21.379.700		23.517.670		25.869.437		28.456.381		31.302.019		130.525.206	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7	01	03	2,01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang Kesra	12 rekomendasi	12 rekomendasi	21.379.700	12 rekomendasi	23.517.670	12 rekomendasi	25.869.437	12 rekomendasi	28.456.381	12 rekomendasi	31.302.019	12 rekomendasi	130.525.206	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%	40.397.340	100%	46.466.307	100%	53.548.018	100%	61.824.916	100%	71.513.923	100%	273.750.505	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7	01	06	2,01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	40.397.340		46.466.307		53.548.018		61.824.916		71.513.923		273.750.505	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7	01	06	2,01	11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum	5 rekomendasi	5 rekomendasi	20.105.006	5 rekomendasi	22.115.507	5 rekomendasi	24.327.057	5 rekomendasi	26.759.763	5 rekomendasi	29.435.739	5 rekomendasi	122.743.072	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7	01	06	2,01	18		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan desa	5 rekomendasi	5 rekomendasi	20.292.334	5 rekomendasi	24.350.801	5 rekomendasi	29.220.961	5 rekomendasi	35.065.153	5 rekomendasi	42.078.184	5 rekomendasi	151.007.433	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7	01	06				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7	01	04	2,01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	0		0		0		0		0		0	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN
			7	01	04	2,01	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional, dan Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum	5 rekomendasi	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC MLANDINGAN	KEC MLANDINGAN



# BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagaimana komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.1.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mlandingan bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan dapat mendukung tujuan pembangunan daerah tahun 2021-2026 yaitu Membangun pemerintahan yang profesional, bersih dan tangguh. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Situbondo dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut: Indikator Kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	<b>SASARAN TEKNIS</b>								
1.	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mlandingan	B (83,56)	B (84,60)	A (85,50)	B (87)	A (90)	A (91,60)	A (95)	A (95)
2.	Jumlah desa berkembang menjadi desa maju di kecamatan Situbondo	1	1	1	1	1	1	1	1



# BAB VIII

## PENUTUP

Renstra ini merupakan hasil dari proses kerja sama seluruh Karyawan/i. di lingkungan Kecamatan Mlandingan yang tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para Pemangku Kepentingan “stakeholders”, baik secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya.

Di samping itu, Renstra Kecamatan Mlandingan Tahun 2021-2026 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LKIP nantinya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya. Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam **Urusan Penunjang Kecamatan** khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2021-2026.

Selanjutnya kami sangat mendambakan adanya tegur sapa guna penyempurnaan / perbaikan yang dimungkinkan pada penulisan Perubahan Rencana Strategis ini.

Mlandingan, 09 Agustus 2023



**ANANG SUHARIYANTO, S.Sos.M.Si**

Pembina Tk. 1

NIP. 196704071988021001



